

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Kompetensi Perangkat Desa**

###### **2.1.1.1 Pengertian Kompetensi Perangkat Desa**

Menurut Edison, Anwar dan Komariyah (2016: 142) dalam jurnal Tjahyanti, S., & Chairunnisa, N. (2020) Kompetensi adalah kemampuan individu untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan benar dan memiliki keunggulan yang didasarkan pada hal-hal yang menyangkut pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*), dan sikap (*attitude*). Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2013 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Kompetensi diartikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Kompetensi Pemerintahan, Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Aparatur Sipil Negera, berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Aparatur Sipil Negera tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

Menurut Peraturan Bupati Cilacap No. 257 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, perangkat desa merupakan bagian dari pemerintah desa yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa terdiri atas sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Sedangkan, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Keputusan Kepala desa yang menguasai sebagian kekuasaan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.

Maka dapat diketahui bahwa pengertian dari Kompetensi adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh perangkat desa dalam menunjang pelaksanaan tugas dan jabatannya yang berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku. Perangkat desa merupakan unsur yang penting dalam pengelolaan dana desa, suatu program/kegiatan tidak berjalan tanpa adanya dukungan perangkat desa, untuk itu dibutuhkan perangkat desa yang kompeten untuk melaksanakan kegiatan desa agar sesuai dengan sasaran/tujuan yang telah ditetapkan (Adillah et al., 2021).

#### **2.1.1.2 Standar Kompetensi Kerja Indonesia (SKKNI)**

Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2013 menjelaskan bahwa Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SKKNI diterapkan untuk kegiatan yang sistematis dalam rangka pengimplementasian

SKKNI di bidang pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi kerja serta manajemen dan pengembangan sumber daya manusia.

Pelatihan kerja diartikan sebagai seluruh kegiatan yang berhubungan dengan memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Setelah dilakukannya pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi kerja, kemudian diberikan sertifikasi kompetensi kerja. Sertifikasi kompetensi kerja merupakan proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai dengan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

### **2.1.1.3 Tipe-tipe Karakteristik Kompetensi**

Wibowo (2017) dalam N. Deviyanti dan N. Wati (2022) menyatakan bahwa terdapat 5 tipe karakteristik kompetensi yaitu sebagai berikut:

a. **Motif**

Motif merupakan sesuatu yang secara sadar dipikirkan dan diinginkan oleh seseorang hingga muncul suatu tindakan. Motif juga dapat diartikan sebagai mendorong, memilih dan mengarahkan perilaku menuju tindakan atau tujuan yang hendak dicapai.

b. **Sifat**

Sifat dikaitkan dengan karakteristik dan respon terhadap sesuatu yang berkaitan dengan situasi atau informasi. Contohnya, reaksi dan ketajaman mata yang merupakan ciri fisik kompetensi dari seorang pilot tempur.

c. Konsep Diri

Konsep diri berkaitan dengan nilai-nilai, sikap atau citra diri dari seseorang. Percaya diri adalah bagian dari konsep diri, karena percaya diri merupakan keyakinan orang bahwa mereka dapat efektif dalam hampir disetiap situasi.

d. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan informasi yang dimiliki oleh orang dalam bidang tertentu. Pengetahuan juga merupakan kompetensi yang cukup kompleks, karena pengetahuan tidak dapat diprediksi dan tidak dapat diukur.

e. Keterampilan

Keterampilan merupakan kemampuan seseorang dalam mengerjakan tugas baik secara fisik maupun mental. Kompetensi mental atau keterampilan kognitif termasuk cara berpikir analitis dan konseptual.

### **2.1.1.3 Pengukuran Kompetensi Perangkat Desa**

Menurut Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia menyatakan bahwa kompetensi kerja mencakup:

1. Pengetahuan yaitu pemahaman mengenai kebijakan dan peraturan terkait dengan pengelolaan keuangan desa maupun penyusunan laporan, mengetahui dokumen yang dibutuhkan dalam pembangunan desa dan laporan keuangan, serta mengetahui prinsip dan praktik pembangunan desa.
2. Keterampilan yaitu kemampuan dalam menggunakan teknologi guna untuk mendukung kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan maupun penyusunan laporan keuangan, kemampuan dalam

melakukan komunikasi lisan yang dibutuhkan dalam mendampingi pelaksanaan pembangunan desa, dan kemampuan dalam melakukan komunikasi dengan para pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan, serta mampu menganalisis data.

3. Sikap kerja yaitu perilaku yang dimiliki oleh pekerja seperti memiliki rasa tanggung jawab, komunikatif, cermat dan teliti, serta integritas atau konsisten dalam melakukan pekerjaannya.

## **2.1.2 Pengelolaan Keuangan Desa**

### **2.1.2.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengelolaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mengelola; proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa (Permendagri No. 20 Tahun 2018).

Menurut permendagri No. 20 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Adanya pengelolaan keuangan desa agar dana desa yang berasal dari pusat dipergunakan secara efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. Pengelolaan keuangan desa dalam satu tahun anggaran antara lain tercantum dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. APBDesa terdiri atas: Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa (Suwarno, 2019).

#### **2.1.2.2 Proses Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa mencakup:

##### **1. Perencanaan**

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan mengenai penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran tersebut yang dianggarkan dalam APB Desa. Penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan pada RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota pada setiap tahunnya. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang kemudian disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.

##### **2. Pelaksanaan**

Kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota yang didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Rekening kas desa pada bank tersebut digunakan oleh kaur keuangan untuk menyimpang uang tunai dengan jumlah tertentu untuk memnuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

Kepala desa menugaskan kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai dengan tugasnya yaitu menyusun DPA paling lama 3 hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) terdiri atas:

- a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, yaitu merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.
- b. Rencana Kerja Kegiatan Desa, yaitu merinci mengenai lokasi kegiatan dilaksanaka, perkiraan biaya, sasaran kegiatan, waktu pelaksanaan kegiatan dan tim yang akan melaksanakan kegiatan.
- c. Rencana Anggaran Biaya, yaitu merinci setiap biaya yang dikeluarkan untuk setiap kegiatan

DPA yang telah disetujui oleh kepala desa tersebut kemudian digunakan oleh kaur dan kasi untuk melaksanakan kegiatan pengadaan melalui swakelola atau penyedia barang/jasa.

### 3. Penatausahaan

Penatausahaan Keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Buku pembantu kas umum yang wajib dibuat oleh kaur keuangan terdiri atas:

- a. Buku pembantu bank, yaitu catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa

- b. Buku pembantu pajak, yaitu catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak
- c. Buku pembantu panjar, yaitu catatan pemberiaan dan pertanggungjawaban uang panjar

Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh kaur keuangan kepada sekretaris desa. Sekretaris desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan kemudian melaporkannya kepada kepala desa untuk disetujui.

#### 4. Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat. Laporan yang dimaksud tersebut terdiri dari:

- a. Laporan pelaksanaan APB Desa
- b. Laporan realisasi kegiatan

Kepala desa menyusun laporan tersebut dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.

#### 5. Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawabam disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran yang berkenaan dengan peraturan desa.

Laporan pertanggungjawab merupakan bagian dari laporan penyelenggaran pemerintah desa akhir tahun anggaran yang kemudian diinformasikan kepada

Masyarakat melalui media informasi. Informasi yang termuat dalam laporan pertanggungjawaban yaitu:

- a. Laporan realisasi APB Desa
- b. Laporan realisasi kegiatan
- c. Kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksana
- d. Sisa anggaran
- e. Alamat pengaduan

### **2.1.2.3 Hambatan Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengelolaan keuangan desa seringkali menjadi masalah yang begitu kompleks dan sulit untuk ditangani. Menurut A. Damayanti, dkk (2023) ada beberapa masalah dalam pengelolaan keuangan desa diantaranya:

1. Lemahnya pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran, sehingga sering terjadi penyalahgunaan anggaran yang merugikan Masyarakat.
2. Minimnya kepatuhan terhadap aturan dan prosedur, serta kurangnya pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa
3. Laporan keuangan yang disusun tidak akuntabel dan transparan
4. Kurangnya rasa tanggungjawab terhadap penggunaan anggaran desa kepada masyarakat.

Selain hambatan, pengelolaan pengelolaan keuangan desa juga terdapat tantangan yang harus dihadapi, baik internal maupun eksternal. Menurut Raharjo (2021:7-8) tantangan internal desa dalam pengelolaan keuangan desa diantaranya sebagai berikut:

1. Kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan desa masih terbatas

2. Tingkat kesulitan geografis tiap desa bervariasi mulai dari ringan, sedang dan berat
3. Ketidaktepatan, baik dari sasaran, target, *output*, dan kebutuhan besaran anggaran dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dan anggaran
4. Adanya keterbatasan pada sarana dan prasarana di kantor desa
5. Integritas dan mentalitas sebagian kepala desa dan perangkat desa

Sedangkan tantangan eksternal dalam pengelolaan keuangan desa, diantaranya sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah, Gubernur dan Bupati/Wali Kota masih belum berjalan dengan optimal
2. Ketidakterediaan perpub/perwali terkait kewenangan desa dan pengelolaan keuangan desa
3. Kapasitas pemerintah supra desa yang melaksanakan tugas binwas terbatas
4. Pendampingan yang masih belum maksimal

#### **2.1.2.4 Indikator Pengelolaan Keuangan Desa**

Adapun indikator dalam pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, antara lain:

1. Transparan

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governansi tentang Pedoman Umum Governansi Sektor Publik (PUG-SPI) (2022:11), nilai transparansi atau keterbukaan dalam pemerintahan menjawab hak setiap warga negara untuk memiliki akses terhadap informasi tentang hal yang sudah sedang dan akan dilakukan oleh pemerintah serta tujuan-tujuan yang akan dicapai. Pejabat

pemerintah diharapkan untuk seterbuka mungkin dalam mengungkapkan informasi kepada publik mengenai keputusan dan tindakan dengan jelas dan mudah dipahami. Informasi yang dipublikasi mengenai kinerja dan kegiatan pemerintah yaitu seperti laporan keuangan rutin yang disahkan oleh lembaga audit independen yang memungkinkan masyarakat memberikan penilaian dan evaluasi terhadap pemerintah. Namun ada beberapa informasi yang perlu dibatasi penyebarluasannya misalnya informasi yang berhubungan dengan keamanan dan pertahanan negara serta investasi investigasi kriminal.

Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi untuk masyarakat umum dan kejelasan tentang peraturan-peraturan perundang-undangan dan keputusan pemerintah, dengan indikator sebagai berikut (Tundunaung et al., 2018):

1. Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu
  2. Penyedia informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya
  3. Kemudahan akses informasi
  4. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran.
2. Akuntabel/Akuntabilitas

Akuntabilitas merujuk pada pengembangan rasa tanggung jawab publik bagi pengambil keputusan di pemerintahan, sektor privat dan organisasi kemasyarakatan. Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah desa untuk memberikan pertanggungjawaban kinerjanya dalam satu periode kepada masyarakat desa. Akuntabilitas ini sangat penting mengingat pemerintah desa mengelola dana publik yang cukup besar sehingga Masyarakat desa juga perlu

mengetahui pengelolaannya dalam bentuk pertanggungjawaban tiap tahunnya (Ngakil & Kaukab, 2020).

Menurut Ellwood (1993) dalam Komite Nasional Kebijakan Governasi tentang Pedoman Umum Governasi Sektor Publik (PUG-SPI) (2022:11-12) menjelaskan bahwa ada empat dimensi utama akuntabilitas organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas hukum dan transparansi, dimana lembaga-lembaga publik harus bersikap jujur dalam bekerja dan menaati peraturan hukum yang berlaku sehingga kegiatan dan output sesuai dengan tujuan dan pedoman yang disepakati.
2. Akuntabilitas proses, berkaitan dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan system informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Contoh dari realisasi akuntabilitas proses yaitu pemberian pelayanan publik secara cepat, responsif serta biaya murah.
3. Akuntabilitas program, berkaitan dengan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak serta apakah organisasi sektor publik telah dipertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya minimal.
4. Akuntabilitas kebijakan, terkait dengan dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan-kebijakan yang diambil kepada legislatif dan masyarakat luas

### 3. Partisipatif

Menurut UU No. 6 Pasal 24 Huruf K tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat. Dalam pengelolaan keuangan desa, tentu perlu adanya partisipasi dari masyarakat yang bertujuan agar masyarakat ikut berperan aktif dalam pengambilan keputusan pada pengelolaan keuangan karena merekalah yang paling mengerti mengenai permasalahan yang terjadi di lingkungannya.

Salah satu unsur masyarakat yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD), BPD merupakan lembaga yang ditunjuk untuk menyalurkan aspirasi masyarakat terkait dengan pelaksanaan pemerintahan desa serta ikut secara langsung dalam pengelolaan keuangan desa (Kusuma & Riharjo, 2019).

Menurut Atiningsih & Ningtyas (2019, indikator dari partisipasi masyarakat yaitu:

- a. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan program-program desa
  - b. Mengusulkan rencana anggaran
  - c. Terlibat dalam rapat paripurna
  - d. Terlibat mengawasi dan melaporkan
  - e. Memberikan penilaian pelaksanaan anggaran
4. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Menurut Permendagri No. 20 tahun 2018, pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa satu tahun

anggaran yakni tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Adapun indikator tertib dan disiplin anggaran, yaitu:

- a. Pengelolaan keuangan dikelola dalam tahun anggaran
- b. Pelaksanaan anggaran dilakukan oleh kasi dan kaur
- c. Penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan Bupati/Walikota

### **2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan**

#### **2.1.3.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, laporan keuangan harus memuat informasi yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai agar informasi dapat mendukung dalam pengambilan keputusan serta dapat dipahami oleh para pemakai.

Laporan keuangan daerah harus mengikuti Standar Akuntansi Daerah yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dengan tujuan agar laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kualitas laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh faktor kepatuhan terhadap standar akuntansi kapabilitas sumber daya manusia, serta dukungan sistem yang ada (Rizki Afri Mulia, 2018).

### **2.1.3.2 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah**

Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mengenai tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya

### **2.1.3.3 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Desa**

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) tahun 2016, komponen laporan keuangan desa yang disusun dalam Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa terdiri dari:

#### 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa

Laporan realisasi anggaran desa adalah laporan yang memuat informasi mengenai apakah anggaran yang telah diperoleh digunakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Dengan kata lain laporan realisasi anggaran juga dapat diartikan sebagai laporan yang memuat informasi pelaksanaan anggaran desa selama satu periode tertentu

#### 2. Neraca Desa

Neraca desa menggambarkan posisi keuangan desa pada suatu periode tertentu. Neraca desa memberikan informasi mengenai asset dan kewajiban entitas pemerintah desa pada tanggal pelaporan dan perubahan kekayaan selama periode berjalan. Informasi tersebut dapat digunakan oleh pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pemerintah desa dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintah desa di masa mendatang.

#### 3. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Desa

Catatan atas laporan keuangan desa dibuat dengan tujuan untuk mengungkapkan semua informasi penting, baik yang telah tersaji dalam LRA dan Neraca maupun yang tidak tersaji.

#### **2.1.3.4 Karakteristik Laporan Keuangan Pemerintah**

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (PP No. 71 tahun 2010). Agar laporan keuangan pemerintah daerah berkualitas maka laporan keuangan pemerintah harus memuat empat karakteristik berikut:

### 1. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan para penggunanya. Ciri dari informasi yang relevan antara lain sebagai berikut:

- a. Memiliki manfaat umpan balik
- b. Memiliki manfaat prediktif
- c. Tepat waktu
- d. Lengkap

### 2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan harus menyajikan setiap fakta secara wajar, dapat diverifikasi serta tidak menyesatkan para pengguna. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a. Penyajian wajar
- b. Dapat diverifikasi
- c. Netralitas/tidak berpihak

### 3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal yaitu dengan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Dan perbandingan secara eksternal yaitu bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

### 4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus sederhana sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh para pengguna dalam membaca dan mempelajari informasi tersebut.

#### **2.1.4 Kajian Empiris**

Untuk mempermudah proses penelitian, peneliti mengambil beberapa referensi dari penelitian terdahulu. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini antara lain:

Futihah, Haulah Nakhwatunnisa, dan Dewi Fatmasari (2023), meneliti mengenai Pengaruh Kualitas Aparatur Pemerintah Desa dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kualitas Aparatur Pemerintah Desa dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) baik secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa.

Sahmin Noholo (2021), meneliti mengenai Pengaruh Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Dengan Intervening Pencegahan *Fraud*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pencegahan *Fraud*, Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah, Pencegahan *Fraud* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah, serta Kompetensi Sumber Daya Manusia melalui Pencegahan *Fraud* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

Isyah Jamiatus Sholihah, Neni Nurhayati, dan Dendi Purnama (2020), meneliti mengenai Kompetensi Aparatur Desa, Pemanfaatan Sistem Keuangan Desa, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur Desa, Pemanfaatan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Agus Wahyudi dan Diah Anggeraini Hasri (2021), meneliti mengenai Pengaruh Peran Badan Permusyawaratan Desa dan Kualitas Perangkat Desa Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Peran Badan Permusyawaratan Desa berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa. Kemudian Kualitas Perangkat Desa berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa.

Mahdiah Yusuf Hasliani dan Marwah Yusuf (2021), meneliti mengenai Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa. Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa dan Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa.

R. Neny Kusumadewi (2022), meneliti mengenai Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Perangkat Desa Se Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka). Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa Secara Parsial, Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Desa berpengaruh positif dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa. Secara Simultan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Desa, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa.

Ulfatus Zuhroh (2021), meneliti mengenai Pengaruh Kompetensi Bidang Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kompetensi Bidang Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, Kompetensi Bidang Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan desa di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.

Agus Wahyudi dan Diah Anggeraini Hasri (2021), meneliti mengenai Pengaruh Kualitas Perangkat Desa Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kualitas Perangkat Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa. Hasil uji determinasi menunjukkan bahwa 58,2% variabel kualitas laporan keuangan desa dapat dijelaskan oleh variabel kualitas perangkat desa, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikut sertakan dalam penelitian ini.

Ayi Srie Yuniawati (2021), meneliti mengenai Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa. Hasil penelitiannya

menunjukkan bahwa Kompetensi Aparat Desa berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa.

Setyobudi (2022), meneliti mengenai Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan, Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Raidah Abdillah, Rahma Nazilla Muhammad dan Arif Apriady (2021), meneliti mengenai Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa dan Penerapan SISKEUDES Terhadap Kualitas Laporan Dana Desa (Survey Pada Desa-Desa di Kecamatan Arjasari). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Secara Parsial, Kompetensi Perangkat Desa dan Penerapan Sistem Keuangan Desa berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Kualitas Laporan Dana Desa. Secara Simultan, Kompetensi Perangkat Desa dan Penerapan Sistem Keuangan Desa memiliki pengaruh yang positif serta signifikan terhadap Kualitas Laporan Dana Desa.

Silvia Almar'atus Sholohah, Ardiani Ika Sulistyawati dan Aprih Santoso (2019), meneliti mengenai Kualitas Laporan Keuangan dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil Penelitiannya menunjukkan Penerapan Good Government Governance, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan

tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah DPKAD Kota Semarang dan Penerapan Pengawasan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah DPKAD Kota Semarang.

Sri Ayem dan Husni Rofikoh (2020), meneliti mengenai Pengaruh Kompetensi Akuntansi, Pemahaman Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Sistem Informasi, dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Pemerintah desa di Kabupaten Kebumen). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kompetensi Akuntansi, Pemahaman Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Sistem Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa serta Tingkat Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan yang dihasilkan Pemerintah Desa.

Siska Yulia Defitri (2018) meneliti mengenai Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki hubungan yang positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, sedangkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Budiman Slamet dan Nadia Dwi Irmadiani (2022), meneliti mengenai Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus BPKAD Kabupaten Bogor). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Secara

parsial, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Secara simultan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Shohabatussa'adah dan Muhammad Nasrullah (2021), meneliti mengenai Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Secara parsial Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Adapun Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Kemudian secara simultan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan.

Destipa Imelia, Sri Rahayu dan Wiralestari (2021), meneliti mengenai Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemda Kerinci. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Secara simultan, Kompetensi SDM, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Secara parsial, menunjukkan Kompetensi SDM, Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Sistem Pengendalian Internal menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan.

Febriana Nafi'ah Vidyasari dan Bambang Suryono (2021), meneliti mengenai Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, serta Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Reficensa Therisia,, Diah Nurdiwaty dan Erna Puspita (2021), meneliti mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah BPKAD Kabupaten Nganjuk Tahun 2020. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Secara parsial, Bidang SAKD Bidang Pengelolaan Keuangan dan Kompetensi SDM mempunyai dampak positif dan dampak signifikan pada Kualitas LKD, dan secara simultan SAKD, Pengelolaan Keuangan dan Kompetensi SDM, mempunyai dampak positif dan dampak signifikan pada Kualitas LKD.

Zaizar Wiet Rifandi (2019), meneliti mengenai Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan

Transparansi Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa berpengaruh positif pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa, Transparansi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa.

**Tabel 2. 1**  
**Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian, Tahun dan Tempat (1)	Persamaan (2)	Perbedaan (3)	Hasil Penelitian (4)	Sumber (5)
1	Futihah, Haulah Nakhwatunni sa, dan Dewi Fatmasari (2023) Pada Desa di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes	- Variabel X: Kompetensi Perangkat Desa - Variabel Y: Kualitas Laporan Keuangan Desa	- Variabel X: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) - Menggunakan teknik analisis data regresi sederhana	Kualitas Aparatur Pemerintah Desa dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) baik secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa.	<i>Journal of Sharia Accounting and Tax</i> Vol. 1, No. 1, 2023
2	Sahmin Noholo (2021) Pada OPD penghasil PAD pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo.	- Variabel X: Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) - Variabel Y: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	- Variabel Intervening Pencegahan <i>Fraud</i> - Metode analisis <i>expost facto</i>	Kompetensi SDM berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pencegahan Fraud, Kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah,	<i>Jambura Accounting Review</i> , Volume 2 No. 2, Agustus 2021, Hal. 136 - 147 e-ISSN 2721-3617

					Pencegahan Fraud berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah, serta Kompetensi Sumber Daya Manusia melalui Pencegahan Fraud berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.
3	Isyah Jamiatus Sholihah, Neni Nurhayati, dan Dendi Purnama (2020) Pada Desa di Kecamatan Talaga dan Kecamatan Maja	- Variabel X: Kompetensi Aparatur Desa - Variabel Y: Kualitas Laporan Keuangan Desa	- Variabel X: Pemanfaatan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Sistem Pengendalian Internal	Kompetensi Aparatur Desa, Pemanfaatan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan Vol 13, No 3, Desember 2020 p-ISSN: 2086-7662 e-ISSN: 2622-1950
4	Agus Wahyudi dan Diah Anggeraini Hasri (2021) Pada Desa di wilayah Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa	- Variabel X: Kualitas Perangkat Desa - Variabel Y: Kualitas Laporan Keuangan Desa	- Variabel X: Peran Badan Permusyawaratan Desa - Menggunakan teknik analisis data regresi berganda	Peran Badan Permusyawaratan Desa berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa. Kemudian Kualitas Perangkat Desa berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa.	Jurnal Maneksi Vol 10, No. 1, Bulan Juni Tahun 2021 p-ISSN: 2302-9560/e-ISSN: 2597-4599
5	Mahdiah Yusuf Hasliani dan Marwah	- Variabel X: Transparansi - Variabel Y: Kualitas	- Variabel X: Implementasi Aplikasi	Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa dan Transparansi	<i>YUME: Journal of Management</i> Volume 4 Issue

	Yusuf (2021) Pada Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang	Laporan Keuangan Pemerintah Desa - Pengumpula n data menggunaka n kuisioner	Sistem Keuanga Desa - Menggunakan teknik analisis data regresi berganda	berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa.	1 (2021) Pages 179 – 192 ISSN: 2614- 851X (Online)
6	R. Neny Kusumadewi (2022) Pada Perangkat Desa Se Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka	- Variabel X: Sumber Daya Manusia - Variabel Y: Kualitas Laporan	- Variabel X: Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Desa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi - Menggunakan teknik analisis data regresi berganda	Secara Parsial, Kompetensi SDM tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Desa berpengaruh positif dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa. Secara Simultan, Kompetensi SDM, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Desa, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa.	Jurnal Bisnis Manajemen dan Kewirausahaan, Volume 1 Nomor 2, Juli 2020 p-2723-1941
7	Ulfatus Zuhroh (2021) Pada Desa di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang	- Variabel X: Kompetensi Bidang Akuntansi - Variabel Y: Kualitas Laporan Keuangan Desa	- Variabel X: Sistem Pengendalian Intern - Menggunakan teknik analisis data regresi berganda	Kompetensi Bidang Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kecamatan	Jurnal Sustainable Vol. 01, No. 2, November, 2021 e-ISSN: 2807- 7318, p-ISSN: 2808-3482

		- Populasi Perangkat Desa			Ketapang Kabupaten Sampang,	
		- Teknik pengumpulan data menggunakan Kuisisioner			Kompetensi Bidang Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan desa di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.	
<b>8</b>	Agus Wahyudi dan Diah Anggeraini Hasri (2021) Pada desa di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa	- Variabel X: Kualitas Perangkat Desa - Variabel Y: Kualitas Laporan Keuangan Desa - Teknik pengumpulan data menggunakan Kuisisioner	- Menggunakan teknik analisis data regresi berganda di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa	- Menggunakan teknik analisis data regresi berganda di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa	Kualitas Perangkat Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa. Hasil uji determinasi menunjukkan bahwa 58,2% variabel kualitas laporan keuangan desa dapat dijelaskan oleh variabel kualitas perangkat desa, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikuti sertakan dalam penelitian ini	Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan Vol. 9 No. 2, 2021 pg. 293-298 ISSN 2337 – 7852 e-ISSN 2721 – 3048
<b>9</b>	Ayi Srie Yuniawati (2021) Pada Desa di Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang	- Variable X: Kompetensi Aparatur Desa - Variabel Y: Kualitas Laporan Keuangan Desa	- Menggunakan teknik analisis data regresi linier sederhana	- Menggunakan teknik analisis data regresi linier sederhana	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kompetensi Aparat Desa berpengaruh signifikan terhadap Kualitas	<i>International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)</i> Vol 5, Issues 1, 2021

				Laporan Keuangan Desa.	e-ISSN: 2614-1280 p-ISSN 2622-4771
<b>10</b>	Setyobudi (2022) Pada Kabupaten Pati	- Variabel X: Pengelolaan Keuangan dan Kapasitas Sumber Daya Manusia - Variabel Y: Kualitas Laporan Keuangan	- Variabel X: Pemahaman Sistem Akuntansi - Menggunakan teknik analisis data regresi berganda	Baik secara parsial maupun simultan Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Kapasitas SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS) Vol 3, No 3, Februari 2022, Hal 502–509 ISSN 2685-869X (media online)
<b>11</b>	Raidah Abdillah, Rahma Nazilla Muhammad dan Arif Apriady (2021) Pada Desa-Desa di Kecamatan Arjasari	- Variabel X: Kompetensi Perangkat Desa - Variabel Y: Kualitas Laporan Dana Desa	- Variabel X: Penerapan SISKEUDES - Menggunakan teknik analisis data regresi berganda	Secara Parsial, Kompetensi Perangkat Desa dan Penerapan Sistem Keuangan Desa berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Kualitas Laporan Dana Desa. Secara Simultan, Kompetensi Perangkat Desa dan Penerapan Sistem Keuangan Desa memiliki pengaruh yang positif serta signifikan terhadap Kualitas Laporan Dana Desa.	<i>Indonesian Accounting Research Journal</i> Vol. 1, No. 2, February 2021, pp. 261 – 270 ISSN: 2747-1241
<b>12</b>	Silvia Almar'atus Sholohah, Ardiani Ika	- Variabel X: Kompetensi Sumber Daya Manusia,	- Variabel X: Penerapan Good Government	Penerapan Good Government, Penerapan	<i>Indonesia Accounting Journa.</i> Volu. 1, No. 2,

	Sulistyawati dan Aprih Santoso (2019) Pada DPKAD Kota Semarang	- Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Y:	Governance, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan, dan penerapan pengawasan.	Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah DPKAD Kota Semarang dan Penerapan Pengawasan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah DPKAD Kota Semarang.	December 2019. Pages 45-56
<b>13</b>	Sri Ayem dan Husni Rofikoh (2020) Pada Kabupaten Kebumen	- Variabel Kualitas Laporan Keuangan Desa	Y:	- Variabel X: Kompetensi Akuntansi, Pemahaman UU No. 6 Tahun 2014, Sistem Informasi, serta Pengendalian Internal	Kompetensi Akuntansi, Pemahaman Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Sistem Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa serta Tingkat Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan yang	Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Vol. 10 No. 1, Januari-April 2020 ISSN: 2599-2651

					dihasilkan Pemerintah Desa.	
<b>14</b>	Siska Yulia Defitri (2018) Pada Kota Solok	- Variabel X: Pengelolaan Keuangan Daerah - Variabel Y: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	- Variabel X: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah - Menggunakan teknik analisis data regresi berganda	Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki hubungan yang positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, sedangkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Jurnal Benefita 3(1) Februari 2018 (64-75)	
<b>15</b>	Budiman Slamet dan Nadia Dwi Irmadiani (2022) Pada BPKAD Kabupaten Bogor	- Variabel X: Pengelolaan Keuangan Daerah - Variabel Y: Kualitas Laporan Keuangan Daerah	- Variabel X: Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah - Menggunakan teknik analisis data regresi berganda	Secara parsial Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Secara simultan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.	Pulic Service and Governance Journal Vol. 03 No. 01 Tahun 2022	
<b>16</b>	Shohabatussa'adah dan Muhammad	- Variabel X: Kompetensi	- Variabel X: Pemanfaatan Teknologi	Kompetensi SDM dan Pemanfaatan Teknologi	Jurnal Akuntansi Publik	

	Nasrullah (2021) Pada Kota Pekalongan	Sumber Daya Manusia - Variabel Y: Kualitas Lahiran Keuanagn Daerah	Informasi dan Sistem Pengendalian Intern - Menggunakan teknik analisis data regresi berganda	Informasi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Adapun Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Secara simultan, Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan.	Volume 1, Nomor 1, Juni 2021
17	Destipa Imelia, Sri Rahayu dan Wiralestari (2021) Pada Pemda Kerinci	- Variabel X: Kompetensi Sumber Daya Manusia - Variabel Y: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa - Teknik pengumpulan data menggunakan Kuisisioner	- Variabel X: Partisipasi Penyusunan Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal	Secara simultan, Kompetensi SDM, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Secara	Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Jambi. Vol. 6, No. 3 Juli – September 2021: 149-163 e-ISSN 2460-6235 p-ISSN 2715-5722

					parsial, menunjukkan Kompetensi SDM, Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Sistem Pengendalian Internal menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan..	
<b>18</b>	Febriana Nafi'ah Vidyasari dan Bambang Suryono (2021) Pada BPKAD Kabupaten Madiun	- Variabel X: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah - Variabel Y: Kualitas Laporan Keuangan Daerah - Teknik pengumpulan data menggunakan Kuisioner	- Variabel X: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah - Menggunakan teknik analisis data regresi berganda	- Variabel X: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, serta Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Volume 10, Nomor 4, April 2021 e-ISSN: 2460-0585	
<b>19</b>	Reficensa Therisia, Diah Nurdiwaty	- Variabel Y: Kualitas Laporan	- Variabel X: Sistem Akuntansi Keuangan	Secara parsial, Bidang SAKD Bidang Pengelolaan	Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi dan	

	dan Erna Puspita (2021) Pada BPKAD Kabupaten Nganjuk Tahun 2020	Keuangan Pemerintah - Teknik pengumpulan data menggunakan Kuisisioner	Daerah, Standar Akuntansi Pemerintah	Keuangan dan Kompetensi SDM mempunyai dampak positif dan dampak signifikan pada Kualitas LKD, dan secara simultan SAKD, Pengelolaan Keuangan dan Kompetensi SDM, mempunyai dampak positif dan dampak signifikan pada Kualitas LKD, sesuai dengan	Akuntansi. Vol. 18, No. 1
20	Zaizar Wiet Rifandi (2019) Pada Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo	- Variabel X: Sumber Daya Manusia dan Transparansi - Variabel Y: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa	- Variabel X: Aplikasi Sistem Keuangan Desa - Menggunakan teknik analisis data regresi berganda	Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa berpengaruh positif pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa, Kompetensi SDM berpengaruh positif pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa, Transparansi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa.	JRA Tirtayasa Vol. 04 No. 01 April 2019 p-ISSN: 2548 7078 e-ISSN: 2656-4726

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini menjadi salah satu faktor yang mendorong sumber daya manusia dalam organisasi publik untuk meningkatkan kompetensinya.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Kompetensi Pemerintahan, Kompetensi adalah kemampuan

dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Aparatur Sipil Negera, berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Aparatur Sipil Negera tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

Perangkat desa merupakan unsur yang penting dalam pengelolaan keuangan desa karena suatu program/kegiatan tidak berjalan tanpa adanya dukungan perangkat desa (Adillah et al., 2021). Dalam pengelolaan keuangan desa yang baik, kepala desa dan perangkat desa yang terkait dengan sistem pelaporan keuangan harus memiliki sumber daya yang berkualitas. Sumber daya yang berkualitas tersebut harus didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan (Basri et al., 2021). Oleh karena itu untuk menciptakan pengelolaan keuangan desa yang baik, SDM yang berkualitas diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa dan juga pertanggungjawabannya. Jika aparatur desa tersebut bisa profesional, maka hasil pengelolaannya akan terimplementasi dengan baik (Mayasari, R et al., 2024:17).

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitrinanda et al., (2020) menyatakan bahwa kompetensi perangkat desa mempengaruhi pengelolaan keuangan desa. Perangkat desa menyadari dalam mengelola keuangan desa dibutuhkan kompetensi yang cukup. Kompetensi dapat ditingkatkan melalui mengikuti pelatihan-pelatihan, pengalaman bekerja, serta menempuh jenjang pendidikan lebih lanjut.

Laporan keuangan dinyatakan memiliki kualitas informasi apabila informasi dalam laporan keuangan tersebut dapat berguna bagi para penggunanya.

Hal ini sejalan dengan *decision-usefulness theory* dimana implementasi dari teori ini menyatakan bahwa pemerintah desa harus membuat dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas untuk memberikan informasi yang berguna bagi setiap pihak yang berkepentingan baik itu internal maupun eksternal (Puspasari & Purnama, 2018).

Dalam pembuatan laporan keuangan memerlukan sumber daya manusia yang berkompeten. Terdapatnya perangkat desa yang berkualitas di desa akan mendukung hasil laporan keuangan yang bermutu. Perangkat desa merupakan pelopor berjalannya organisasi agar mencapai tujuan yang diinginkan (Mayasari, R et al., 2024:248). Selain itu, apabila perangkat desa kompeten maka akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik sehingga dapat menjadi penyangga utama dan sangat berperan penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Rifandi, 2019). Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki aparatur desa, semangkin baik pula kualitas laporan keuangan yang akan dihasilkan (Ratih & S, 2018). Kurangnya pengetahuan perangkat desa dalam menyajikan laporan keuangan dikhawatirkan tidak memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para penggunanya

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agus Wahyudi dan Diah Anggeraini Hasri (2021), Raidah Abdillah, Rahma Nazilla Muhammad dan Arif Apriady (2021). Semakin berkompeten perangkat desanya maka laporan keuangan yang dihasilkan semakin berkualitas, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan.

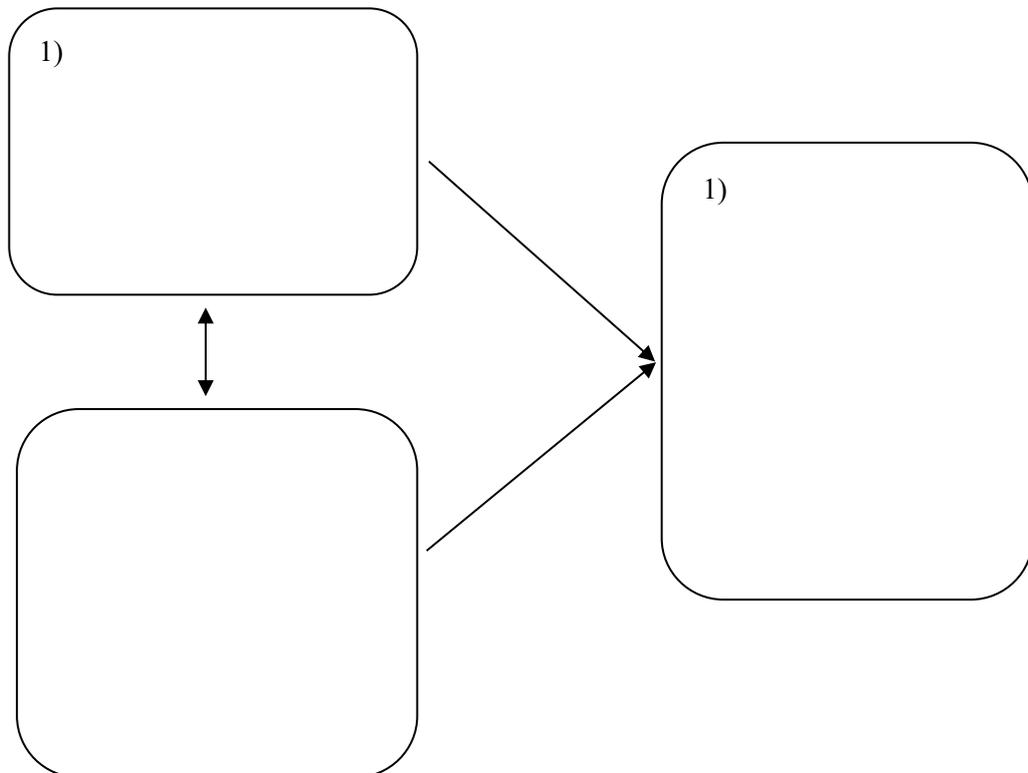
Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Shobatussa'adah & M. Nasrullah (2021) dan R. Neny Kusumadewi (2022) yang menyebutkan bahwa kompetensi sumberdaya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa.

Menurut Mayasari, R et al., (2024:12) Pengelolaan keuangan pada desa ialah segala aktivitas yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban terhadap keuangan desa. Didalam pengelolaannya, pengelolaan keuangan desa wajib mengarah pada hasil yang terbaik. Pengelolaan keuangan yang baik, pada dasarnya akan menciptakan efektivitas pelaporan keuangan yang baik pula, karena pada dasarnya pelaporan keuangan merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan keuangan (Nurazizah et al., 2019). Keuangan desa dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. yang dimaksud tertib adalah bahwa keuangan desa dikelola secara tepat waktu serta taat pada peraturan perundang-undangan yang didukung dengan bukti-bukti administratif sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Artinya pengelolaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efektif serta efisien dapat menghasilkan pelaporan yang baik (Defitri, 2018).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyobudi (2022) dan Budiman Slamet dan Nadia Dwi Irmadiani (2022). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa setiap kenaikan pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siska Yulia Defitri (2018) yang menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa yang dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketetapan pemerintah belum tentu dapat menjamin bagusnya kualitas laporan keuangannya.

Berdasarkan uraian di atas dari judul penelitian: Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa, maka kerangka pemikirannya digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2. 1**

**Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis

Sugiyono (2019: 99) Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka pengujian hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Kompetensi Perangkat Desa, Pengelolaan Keuangan Desa dan Kompetensi Perangkat Desa.
2. Terdapat hubungan antara Kompetensi Perangkat Desa dengan Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Terdapat pengaruh parsial antara Kompetensi Perangkat Desa terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Cimanggu.
4. Terdapat pengaruh parsial antara Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Cimanggu.
5. Terdapat pengaruh simultan antara Kompetensi Perangkat Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Cimanggu.